

Judul : Fadli Zon, Wakil Ketua DPR: Pendapat KPK Sudah Melampaui Batasnya
Tanggal : Jumat, 07 Desember 2018
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

FADLI ZON, Wakil Ketua DPR Pendapat KPK Sudah Melampaui Batasnya

Bagaimana tanggapan Anda soal pernyataan Wakil Ketua KPK tersebut?

Saya kira pendapat itu sudah melampaui dari kapasitasnya. Ya mungkin dia enggak ngerti ya, dia enggak ngerti bagaimana mekanisme pembuatan Undang-Undang. Mungkin dia harus belajar lagi dia itu. Kalau dia mau berpolitik, ya dia belajar politik dulu lah yang mengatakan itu.

Memang DPR sudah merasa bekerja optimal dalam membuat undang-undang?

Oh iya. Kan yang membuat undang-undang itu bukan hanya DPR, tetapi kami bersama dengan pemerintah. Proses membuat undang-undang seperti itu, kayak enggak ngerti aja itu yang mengatakan. Masalah membuat undang-undang dan merevisi tanya dong ke pemerintah.

Kami malah ingin kitab hukum kita itu lengkap, tapi kan ada dispute dalam hal ini. Justru misalnya perkara khusus ingin ada undang-undang khusus. Ini perbedaan pendapat yang harus diselesaikan.

Banyak pihak yang menganggap DPR tidak serius, tidak memiliki kemauan yang kuat untuk menyelesaikan undang-undang?

Saya kira ini bukan persoalan mau atau tidak mau. Tapi ini soal tarikan-tarikan politik, dan saya kira tidak semua harus diundangkan. Bayangkan, nanti orang harus pakai peci harus diundangkan, harus pakai baju diundangkan. Pembahasan undang-undang itu harus sesuai dengan kebutuhan. Tidak semua hal harus diundangkan. Rakyat juga belum tentu mau diatur dengan undang-undang, ya kan.

Kan perlu ada kebebasan, kecuali undang-undang yang memang dibutuhkan. Jadi pernyataan itu saya kira pernyataan yang di luar tupoksinya sebagai komisioner KPK. Jadi harus hati-hati lah, jangan ngomong sembarangan begitu.

Soal parpol dibiayai negara apakah Anda setuju?

Oh itu saya setuju, sangat setuju. Saya 100 persen saya setuju. Karena

itu suatu praktek yang sangat biasa di negara-negara demokrasi, seperti di Meksiko, Brazil, dan negara lainnya. Itu adalah hal yang sangat biasa, dan menurut saya memang untuk Indonesia itu diperlukan.

Kenapa diperlukan?

Selama ini justru partai-partai sangat kurang mendapat perhatian dari pemerintah, dalam hal ini institusi negara. Padahal ini institusi yang sangat penting.

Kan tidak boleh berusaha, idak boleh mempunyai PT, sehingga tidak jelas dana partai politiknya, kecuali hanya sumbangan-sumbangan anggotanya dan simpatisan.

Kalau di tahun 1950-an parpol boleh punya perkebunan, boleh punya SPBU, boleh punya usaha. Sekarang tidak boleh.

Menurut Anda berapa besaran dananya?

Saya kira saya setuju lah Rp 10.000 per suara. (Angka) Rp 10.000 per suara itu artinya dihitung bagian dari dana politik untuk partai politik merawat konstituen, merawat pendidikan politik, dan sebagainya. Saya kira anggarannya enggak terlalu besar kok. Pasti lebih kecil dari anggaran kemarin IMF World Bank yang sampai Rp 1 triliun itu.

Kemarin Pak Prabowo menyebut banyak media melakukan kebohongan pada aksi 212. Apa dasarnya?

Oh saya belum mendengar persis apa yang disampaikan Pak Prabowo. Tapi saya kira,

yang dimaksud adalah mungkin ada sejumlah media, yang tidak menjalankan prosedur standar jurnalistik. Terkait dengan sebuah peristiwa besar, yang saya kira worth it jadi sebuah news, saya kira terkait hal itu.

Atau bisa juga terkait dengan jumlah, atau apa yang disampaikan tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Saya kira itu nanti saya dengar lagi bagaimana pernyataan lengkapnya. Tapi sekali lagi, saya kira terkait dengan tidak adanya suatu coverage yang memadai standar jurnalistik umum saya kira.

Pak Prabowo berkomentar seperti itu apakah ada datanya?

Saya enggak tahu, ya nanti akan saya lihat lagi. Kan kalau misalnya orang kumpul jutaan, tapi disebut puluhan ribu itu kan bisa sebuah kebohongan juga kan. ■ NDA

